

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemanfaatan teknologi informasi dalam proses pemerintahan dapat meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan. Agar implementasi tata kelola TI berjalan dengan efektif dan efisien, sebuah organisasi melakukan evaluasi sejauh mana tata kelola TI yang berjalan dan dapat mengidentifikasi peningkatan yang dapat dilakukan. Salah satu instansi pemerintahan yang menerapkan tata kelola TI adalah Dinas Komunikasi dan Informatika (DISKOMINFO) Kabupaten Lima Puluh Kota. Dinas Komunikasi dan Informatika (DISKOMINFO) adalah sebuah instansi yang bertanggung jawab atas pengolahan informasi dalam lingkungan Pemerintahan yang ada di Kabupaten Lima Puluh Kota.

Tata kelola TI merupakan bagian dari tata kelola Enterprise yang terdiri dari kepemimpinan serta struktur dan proses organisasi yang memastikan bahwa organisasi TI mendukung dan menggunakan strategi serta tujuan organisasi. Tata kelola TI memastikan pengukuran efektifitas dan efisiensi peningkatan proses bisnis perusahaan melalui struktur yang terkait dengan TI menuju ke arah tujuan strategis perusahaan.

Sehubungan dengan alasan tersebut, diperlukan adanya sebuah perhitungan maturity level pada pengelolaan teknologi informasi. Secara umum kerangka kerja tata kelola TI serta pengendalian yang dibutuhkan untuk

mencapainya disediakan oleh COBIT (*Control Objective for Information and related Technology*). Berdasarkan kendala di atas, dapat disimpulkan bahwa penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tata kelola IT dan melakukan pengukuran maturity level tata kelola teknologi informasi agar memberikan pelayanan yang maksimal dan didukung oleh pengelolaan manajemen yang handal sehingga dapat tercapai tujuan organisasi seperti yang diharapkan.

Dalam melakukan analisis, diperlukan sebuah standar yang bisa membantu agar terjadi pengukuran yang valid dan realable. Dalam penelitian ini standar yang digunakan adalah COBIT 4.1 dipilih karena kerangka kerja COBIT memberikan gambaran paling detail mengenai strategis dan control dalam pengaturan proses teknologi informasi. Dalam standar COBIT juga terdapat perhitungan nilai Maturity Level yang merepresentasikan tingkat keselarasan tujuan teknologi informasi dan tujuan bisnis organisasi. Maka penulis membuat judul "**ANALISIS TATA KELOLA TEKNOLOGI INFORMASI PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA (DISKOMINFO) KABUPATEN LIMA PULUH KOTA MENGGUNAKAN METODE COBIT 4.1**"

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana menganalisis dan mengelola strategi perencanaan teknologi informasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika (DISKOMINFO) Kabupaten Lima Puluh Kota?

2. Bagaimana cara mengukur tingkat kematangan maturity level tata kelola teknologi informasi menggunakan COBIT 4.1 berdasarkan proses-proses yang sudah ada pada Diskominfo Kabupaten Lima Puluh Kota?
3. Bagaimana Menganalisis maturity level sehingga diperoleh suatu rekomendasi perbaikan agar tingkat kematangan tata kelola teknologi informasi dapat meningkat?

1.3 Hipotesa

Dari perumusan masalah yang telah dikemukakan diatas, maka dapat diambil suatu hipotesis yang diharapkan yaitu :

1. Dengan diterapkannya analisis tata kelola teknologi informasi dengan penerapan Framework COBIT 4.1 yang diimplementasikan menggunakan bahasa pemrograman Visual Studio dan didukung dengan database MySQL diharapkan dapat memberikan penilaian terhadap tata kelola teknologi informasi yang ada pada Dinas Komunikasi dan Informatika (DISKOMINFO) Kabupaten Lima Puluh Kota melalui kuesioner yang telah disediakan penulis.
2. Dengan diterapkannya pengukuran tata kelola teknologi informasi dengan penerapan Framework COBIT 4.1 yang diimplementasikan menggunakan bahasa pemrograman Visual Studio dan didukung dengan database MySQL diharapkan dapat memberikan solusi untuk meningkatkan tata kelola teknologi informasi agar meningkatkan kinerja pada Dinas

Komunikasi dan Informatika (DISKOMINFO) Kabupaten Lima Puluh Kota.

1.4 Batasan Masalah

1. Studi kasus hanya digunakan di Dinas Komunikasi dan Informatika (DISKOMINFO) Kabupaten Lima Puluh Kota bidang Tata Kelola Teknologi Informasi.
2. Studi kasus yang dilakukan dalam penelitian menggunakan Metode Cobit 4.1
3. Tidak dilakukannya pembuatan aplikasi untuk organisasi.
4. Penelitian hanya membahas pada domain PO1, PO4, AI3, AI4, DS3, DS5, ME1, ME2.

1.5 Tujuan Penelitian

1. Memahami sistem yang sedang berjalan pada Dinas Komunikasi dan Informatika (DISKOMINFO) Kabupaten Lima Puluh Kota saat ini.
2. Untuk menganalisis hasil tingkat kematangan maturity level masing-masing dengan domain Cobit 4.1 di Dinas Komunikasi dan Informatika (DISKOMINFO) Kabupaten Lima Puluh Kota.
3. Memberikan rekomendasi sebagai usulan perbaikan pada Dinas Komunikasi dan Informatika (DISKOMINFO) Kabupaten Lima Puluh Kota.

1.6 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan, adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Menerapkan ilmu pengetahuan yang didapatkan selama perkuliahan kedalam satu sistem yang bermanfaat bagi Diskominfo Kabupaten Lima Puluh Kota.
2. Instansi dapat mengetahui gap atau kesenjangan, dengan adanya penelitian ini instansi dapat mengetahui gap atau kesenjangan yang terjadi sehingga dapat ditingkatkan dimasa yang akan datang.
3. Sebagai bahan pertimbangan bagi Diskominfo Kabupaten Lima Puluh Kota untuk mempermudah pihak pegawai dalam meningkatkan tujuan bisnis organisasi.
4. Menambah pengetahuan terkait bidang ilmu yang diambil dalam penelitian dan dapat menjadi referensi bagi mahasiswa jurusan sistem informasi dalam penyusunan penelitian selanjutnya.

1.7 Tinjauan Umum Perusahaan

1.7.1 Sejarah Perusahaan

Dinas Komunikasi dan Informatika (DISKOMINFO) Kabupaten Lima Puluh Kota merupakan salah satu unit kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan

Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25); Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1308); Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1026); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Penyelenggaraan Statistik Sektorial oleh Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1270);

1.7.2 Struktur Organisasi

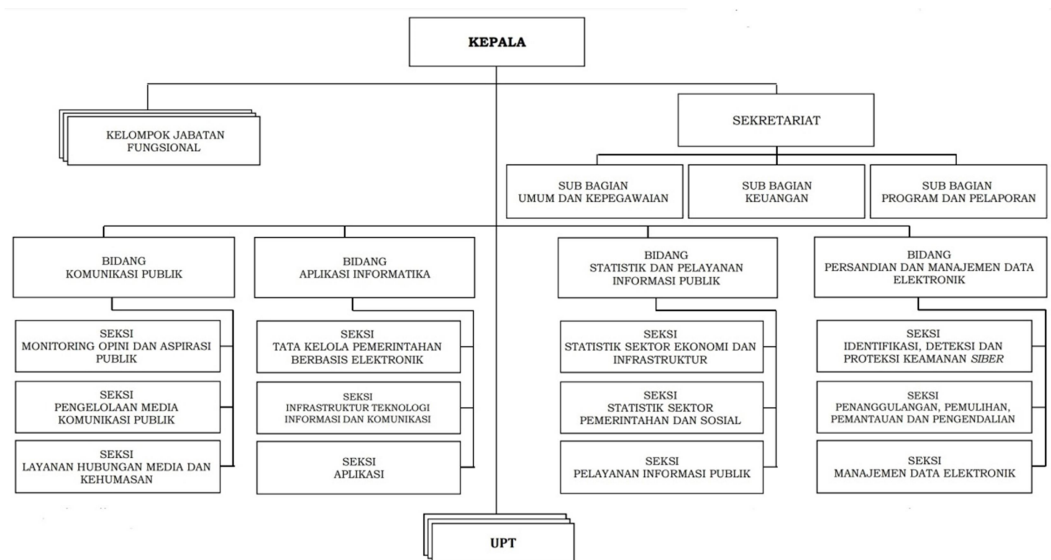
Struktur organisasi adalah suatu sistem yang digunakan untuk mendefinisikan suatu hirarki dalam suatu organisasi. Ini mengidentifikasi setiap pekerjaan, fungsinya dan ke mana ia melapor ke dalam organisasi. Struktur ini dikembangkan untuk menetapkan bagaimana bisnis beroperasi dan membantu usaha dalam mencapai tujuannya untuk memungkinkan pertumbuhan di masa depan. Struktur diilustrasikan menggunakan bagan organisasi.

Struktur organisasi juga menentukan bagaimana informasi mengalir antar level dalam perusahaan. Misalnya, dalam struktur terpusat, keputusan mengalir

dari atas ke bawah, sedangkan dalam struktur desentralisasi, kekuatan pengambilan keputusan didistribusikan di antara berbagai tingkatan organisasi.

Memiliki struktur organisasi memungkinkan perusahaan untuk tetap efisien dan fokus.

Pada gambar 3.1 dibawah ini merupakan gambaran dari struktur organisasi Diskominfo:



Gambar 1. 1 Struktur Organisasi DISKOMINFO

1.7.3 Pembagian Tugas dan Tangung Jawab

Berikut ini merupakan rincian dari tugas pokok dan fungsi yang terdapat dalam struktur organisasi DISKOMINFO:

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin Dinas dalam melaksanakan tugas dan fungsi Dinas. Untuk melaksanakan tugasnya Kepala Dinas mempunyai uraian tugas:

- 1) Mengoordinasikan pengelolaan administrasi dalam rangka pelaksanaan tugas Dinas;
- 2) Mengoordinasikan pengelolaan kebijakan teknis pelaksanaan urusan pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika, Bidang Statistik, dan Bidang Persandian;
- 3) Mengoordinasikan pelaksanaan tugas pembantuan Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika, Bidang Statistik, dan Bidang Persandian;
- 4) Mengoordinasikan pengelolaan sumberdaya untuk mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika, Bidang Statistik, dan Bidang Persandian;
- 5) Melaksanakan urusan pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika, Sub Urusan Komunikasi Publik.

2. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam mengelola urusan kesekretariatan yang meliputi administrasi umum, keuangan, kepegawaian, program dan pelaporan Dinas. Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Dalam melaksanakan tugas, Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- 1) pengoordinasian pengelolaan administrasi dalam rangka pelaksanaan tugas Sekretariat;
- 2) pengoordinasian pengelolaan kebijakan teknis terkait kesekretariatan;

- 3) pengelolaan sumber daya untuk mendukung pelaksanaan tugas Sekretariat;
- 4) pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian Dinas;
- 5) pengelolaan administrasi keuangan Dinas;

Dalam melaksanakan fungsi Sekretariat, Sekretaris mempunyai uraian tugas:

- 1) mengoordinasikan pengelolaan administrasi dalam rangka pelaksanaan tugas Sekretariat;
- 2) mengoordinasikan pengelolaan kebijakan teknis terkait kesekretariatan;
- 3) mengoordinasikan pengelolaan sumberdaya untuk mendukung penyelenggaraan tugas di Sekretariat;
- 4) mengelola administrasi umum dan kepegawaian Dinas;

3. Bidang Komunikasi Publik

Bidang Komunikasi Publik mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan urusan pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika yang meliputi urusan monitoring opini dan aspirasi publik, pengelolaan media komunikasi publik, dan layanan hubungan media dan kehumasan Pemerintah Daerah serta tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah. Bidang Komunikasi Publik Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang Komunikasi Publik yang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Dalam melaksanakan fungsi Bidang Komunikasi Publik, Kepala Bidang Komunikasi Publik mempunyai uraian tugas:

- 1) mengoordinasikan pengelolaan administrasi dalam rangka pelaksanaan tugas Bidang Komunikasi Publik;
- 2) mengoordinasikan pengelolaan kebijakan teknis terkait Bidang Komunikasi Publik;
- 3) mengkoordinasikan pelaksanaan tugas pembantuan terkait Bidang Komunikasi Publik;

4. Bidang Aplikasi Informatika

Bidang Aplikasi Informatika mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan urusan pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika yang meliputi urusan tata kelola pemerintahan berbasis elektronik, infrastruktur teknologi informasi, komunikasi, dan aplikasi serta tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah. Bidang Aplikasi Informatika dipimpin oleh Kepala Bidang Aplikasi Informatika yang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Dalam melaksanakan fungsi Bidang Aplikasi Informatika, Kepala Bidang Aplikasi Informatika mempunyai uraian tugas :

- 1) mengoordinasikan pengelolaan administrasi dalam rangka pelaksanaan tugas Bidang Aplikasi Informatika;
- 2) mengoordinasikan pengelolaan kebijakan teknis terkait Bidang Aplikasi Informatika;
- 3) mengoordinasikan pengelolaan sumberdaya untuk mendukung penyelenggaraan tugas Bidang Aplikasi Informatika;

5. Bidang Statistik dan Pelayanan Informasi Publik

Bidang Statistik dan Pelayanan Informasi Publik mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan penyelenggaraan urusan statistik, dan pelayanan informasi publik, serta tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah. Bidang Statistik dan Pelayanan Informasi Publik dipimpin oleh Kepala Bidang Statistik dan Pelayanan Informasi Publik yang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Dalam melaksanakan fungsi Bidang Statistik dan Pelayanan Informasi Publik, Kepala Bidang Statistik dan Pelayanan Informasi Publik mempunyai uraian tugas:

- 1) mengoordinasikan pengelolaan administrasi dalam rangka pelaksanaan tugas Bidang Statistik dan Pelayanan Informasi Publik;
- 2) mengoordinasikan pengelolaan kebijakan teknis terkait Bidang Statistik dan Pelayanan Informasi Publik;
- 3) mengoordinasikan pengelolaan sumberdaya untuk mendukung penyelenggaraan statistik sektoral dan pelayanan informasi publik;
- 4) mengoordinasikan pelaksanaan tugas pembantuan terkait Bidang Statistik dan Pelayanan Informasi Publik;

6. Bidang Persandian dan Manajemen Data Elektronik

Bidang Persandian dan Manajemen Data Elektronik mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan penyelenggaraan persandian dan

manajemen data elektronik serta tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah. Bidang Persandian dan Manajemen Data Elektronik dipimpin oleh Kepala Bidang Persandian dan Manajemen Data Elektronik yang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Dalam melaksanakan fungsi Bidang Persandian dan Manajemen Data Elektronik, Kepala Bidang Persandian dan Manajemen Data Elektronik mempunyai uraian tugas:

- 1) mengoordinasikan pengelolaan administrasi dalam rangka pelaksanaan tugas Bidang Persandian dan Manajemen Data Elektronik;
- 2) mengoordinasikan pengelolaan kebijakan teknis terkait Bidang Persandian dan Manajemen Data Elektronik;
- 3) mengoordinasikan pengelolaan sumberdaya untuk mendukung penyelenggaraan persandian dan manajemen data elektronik;
- 4) mengoordinasikan pelaksanaan tugas pembantuan terkait Bidang Persandian dan Manajemen Data Elektronik;

7. Unit Pelaksana Teknis (UPT)

- 1) Untuk menyelenggarakan sebagian tugas Dinas dapat dibentuk UPT pada Dinas sesuai dengan kebutuhan.
- 2) Pembentukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi UPT ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati tersendiri.

8. Kelompok Jabatan Fungsional

- 1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan Dinas secara profesional sesuai dengan kebutuhan.
- 2) Kelompok Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.